

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jum'at, 12 Juli 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia (Halaman 2)	Jum'at, 12 Juli 2019	Berita Foto	Presiden Joko Widodo beserta rombongan mengunjungi Pulau Rinca di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT, kemarin.
2	Media Indonesia (Halaman 9)	Jum'at, 12 Juli 2019	Jakarta Tambah Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta akan kembali bertambah yang akan membuat Jakarta sedikit lebih hijau.
3	Media Indonesia (Halaman 10)	Jum'at, 12 Juli 2019	Perhatikan Konservasi Taman Nasional Komodo	Perlu pemisahan antara zona konservasi dan pariwisata untuk menjaga konservasi alam, serta penerapan sistem kuota kunjungan wisatawan ke TN Komodo.
4	Kompas (Halaman 15)	Jum'at, 12 Juli 2019	Tol Balikpapan-Samarinda: Pembebasan Lahan Belum Tuntas	Sejumlah masalah perlu diatasi agar Jalan Tol Balikpapan-Samarinda fungsional pada akhir tahun 2019. Pembebasan lahan perlu cepet diselesaikan.
5	Kompas (Halaman 16)	Jum'at, 12 Juli 2019	Wisata Sumba Masih Minim Infrastruktur	Wisata minat khusus di Sumba, NTT, terus bergeliat di tengah keterbatasan akomodasi dan infrastruktur pendukung.
6	Kompas (Halaman 16)	Jum'at, 12 Juli 2019	Pemulihan Citarum: Dana Rp 1,4 Triliun Siap Dicairkan	Penanganan limbah domestik dan industri di Sungai Citarum, Jawa Barat, memasuki babak baru.
7	Kompas (Halaman 16)	Jum'at, 12 Juli 2019	Pariwisata Labuan Bajo: Desain Besar Pengembangan Disusun	Pemerintah menyiapkan desain besar pengembangan kawasan wisata strategis Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
8	Koran Tempo (Halaman 6)	Jum'at, 12 Juli 2019	Pembangunan Infrastruktur Daerah Bergantung pada APBN	Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pembangunan infrastruktur di daerah saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer yang bersumber dari APBN.
9	Koran Tempo (Halaman 6)	Jum'at, 12 Juli 2019	Berita Foto	Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana saat mengunjungi Pulau Rinca, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, kemarin.
10	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jum'at, 12 Juli 2019	LMAN Segera Kembalikan Rp28,4 Triliun	Akhirnya, 29 badan usaha jalan tol (BUJT) bisa bernapas lega. Dana yang telah mereka kururkan untuk pengadaan lahan bisa segera kembali setelah ditandatangani nota kesepahaman pengembalian dana talangan tanah untuk pembangunan jalan tol dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
11	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jum'at, 12 Juli 2019	PROYEK BENDUNGAN: Raknamo Baru Berfungsi Tahun Depan	Kendati sudah diresmikan pada awal Januari 2018, Bendungan Raknamo di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, NTT hingga kini belum bisa dimanfaatkan.
12	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jum'at, 12 Juli 2019	Investor Hong Kong Incar 2 Ruas Tol WTR	PT Waskita Toll Road (WTR) menyatakan tengah dalam tahap uji tuntas atau due diligence divestasi saham di dua ruas tol dengan salah satu investor asal Hong Kong. Kesepakatan jual beli saham diestimasi berlangsung pada Agustus 2019.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Presiden Joko Widodo beserta rombongan mengunjungi Pulau Rinca di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT, kemarin.		



AGUS SUPART

KUNJUNGI PULAU RINCA: Presiden Joko Widodo beserta rombongan mengunjungi Pulau Rinca di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, kemarin. Presiden Jokowi mengatakan pengembangan kawasan Taman Nasional Komodo ke depannya akan dibuat lebih terintegrasi antara satu lokasi wisata dan lainnya di NTT. Pulau Komodo akan dijadikan sebagai kawasan eksklusif untuk dikunjungi tamu-tamu atau wisatawan kelas premium dengan biaya mahal. Perhatikan Konservasi... | Hlm 10

Judul	Jakarta Tambah Ruang Terbuka Hijau	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 9)		
Resume	Ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta akan kembali bertambah yang akan membuat Jakarta sedikit lebih hijau.		

Jakarta Tambah Ruang Terbuka Hijau

RUANG terbuka hijau (RTH) Jakarta akan kembali bertambah yang akan membuat Jakarta sedikit lebih hijau. RTH yang baru tersebut berada di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, dan tengah dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Taman Dukuh Atas ini adalah bagian dari penataan koridor Sudirman-Thamrin. Saat ini telah memasuki tahap persiapan akhir sebelum resmi dibuka untuk publik," bunyi akun *Instagram* Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, @aniesbaswedan, Rabu (10/7).

RTH yang berada persis di sisi timur trotoar Sudirman-Dukuh Atas tersebut merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta mengubah ruang jalan untuk kendaraan bermotor menjadi ruang pejalan kaki.

"Sama seperti penataan terowongan Kendal, Pemprov DKI Jakarta mengubah ruang yang tadinya jalan untuk kendaraan bermotor, menjadi ruang untuk pejalan kaki, trotoar" tulis Anies.

Taman terletak di area pertemuan banyak moda transportasi meliputi kereta rel listrik (KRL), moda raya terpadu (MRT), Trans-Jakarta, hingga kereta bandara, itu akan menjadi tempat warga beralih angkutan umum.

"Ruang di Dukuh Atas ini terbuka untuk semua. Sambil berpindah moda transportasi, warga bisa berinteraksi di sini," pungkasnya.

RTH tersebut nantinya ditunjang berbagai fasilitas olahraga, seperti *skate board*, spot ekspresi seni budaya, dan spot edukasi utilitas kota.

Anies pun berharap ruang tersebut dapat menjadi wahana tautan kekeluargaan antarwarga. "Semoga dapat menjadi wahana tautan kekeluargaan antarwarga Jakarta," tutupnya. (Rif/J-1)

Judul	Perhatikan Konservasi Taman Nasional Komodo	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 10)		
Resume	Perlu pemisahan antara zona konservasi dan pariwisata untuk menjaga konservasi alam, serta penerapan sistem kuota kunjungan wisatawan ke TN Komodo.		

Perhatikan Konservasi Taman Nasional Komodo

Perlu pemisahan antara zona konservasi dan pariwisata untuk menjaga konservasi alam, serta penerapan sistem kuota kunjungan wisatawan ke TN Komodo.

JOHN LEWAR
lewar@mediaindonesia.com

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan pembangunan integrasi pariwisata antara Labuan Bajo, Pulau Rinca, dan Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus memperhatikan sisi konservasi.

"Saya tadi sudah menyampaikan ke Kepala Balai (Taman Nasional Komodo) untuk betul-betul dihitung daya dukungnya. Ini ialah kawasan konservasi sehingga nanti akan kita buat desain besar, rancangan besar. Mana yang untuk turis, mana yang untuk konservasi, mana yang dikuota, mana yang tidak," kata Presiden Jokowi seusai meninjau Pulau Rinca, kemarin.

Menurut Presiden, di Taman Nasional (TN) Komodo diperlukan pemisahan yang jelas antara zona konservasi dan zona pariwisata. Upaya yang dilakukan itu untuk menjaga konservasi alam melalui rencana penerapan sistem kuota

kunjungan bagi wisatawan di kawasan TN Komodo.

Dengan cara itu, kata Kepala Negara, diharapkan dapat menjaga keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan alam kawasan.

Pemerintah juga memberikan dukungan penuh atas pengembangan yang lebih terintegrasi di TN Komodo. Sejumlah pembenahan fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata di NTT sedang direncanakan, antara lain dermaga kapal dan fasilitas air bersih.

Pengembangan kawasan TN Komodo akan dibuat lebih terintegrasi antara satu lokasi wisata dan lainnya di Provinsi NTT. "Rancangan besar ini sebentar lagi akan kita buat rapat terbatas sehingga *grand design*-nya itu betul-betul sambung antara Labuan Bajo, Rinca, Komodo, lautnya, semuanya terdesain dengan baik dan dikerjakan tidak parsial," ujar Presiden.

Kepada awak media di kawasan wisata Loh Buaya, Pulau Rinca, Presiden juga menyatakan akan menjadikan Pulau Komodo sebagai

kawasan eksklusif untuk dikunjungi tamu-tamu atau wisatawan kelas premium dengan biaya mahal. "Pulau Komodo ke depannya akan dijadikan zona eksklusif bagi turis atau wisatawan berkelas dengan biaya masuk yang sangat tinggi sehingga bisa mendongrak pendapatan negara," ucap Presiden.

Untuk itu, percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan TN Komodo, khususnya Pulau Komodo, akan dibangun seapik mungkin sehingga nyaman untuk dikunjungi wisatawan berkelas. "Percepatan pembangunan akan dilakukan sehingga bisa digunakan secepatnya," papar Jokowi.

Presiden menyebutkan, dari total populasi komodo yang tersebar, kawasan TN Komodo dibagi menjadi dua objek. Salah satunya khusus untuk konservasi eksklusif, yakni Pulau Komodo. "Tidak semua wisatawan bisa masuk. Kalau masuk, dengan biaya yang cukup tinggi," katanya.

Menurut Jokowi, langkah itu dilakukan untuk menjaga kelestarian komodo dari ancaman kepunahan. Bagi wisatawan yang tidak bisa masuk ke Pulau Komodo, masih ada Pulau Rinca yang bisa dikunjungi dengan harga terjangkau.

Pelabuhan wisatawan

Dari Pulau Rinca, Presiden lang-

Pulau Komodo akan dijadikan sebagai kawasan eksklusif untuk dikunjungi tamu-tamu atau wisatawan kelas premium dengan biaya mahal.

sung menuju Dermaga Philemon Labuan Bajo untuk meninjau rencana pengembangan pelabuhan itu. Rencananya Pelabuhan Labuan Bajo akan dijadikan sebagai pelabuhan khusus wisata atau hanya untuk disandari oleh kapal wisatawan yang berkunjung ke daerah itu.

Kepala Biro Humas Setda NTT Marius Ardu Jelamu menjelaskan pelabuhan khusus untuk kapal wisatawan Labuan Bajo yang berada di Kota Labuan Bajo kini sedang dalam tahap pembangunan yang ditangani PT ASDP Indonesia Ferry (pesero). Sementara itu, pelabuhan umum dan barang akan dipindahkan ke luar kota Labuan Bajo, yakni di wilayah Bari, Kecamatan Macang Pacar. Pembangunannya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. (Ant/N-1)

Judul	Tol Balikpapan-Samarinda: Pembebasan Lahan Belum Tuntas	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Sejumlah masalah perlu diatasi agar Jalan Tol Balikpapan-Samarinda fungsional pada akhir tahun 2019. Pembebasan lahan perlu cepet diselesaikan.		

TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA

Pembebasan Lahan Belum Tuntas

BALIKPAPAN, KOMPAS — Sejumlah masalah perlu diatasi agar Jalan Tol Balikpapan-Samarinda fungsional pada akhir tahun 2019. Pembebasan lahan perlu cepet diselesaikan.

Total lahan yang belum dibebaskan dalam proyek tol di Kalimantan Timur itu seluas 8,2 hektar (ha). Kebutuhan lahan proyek sepanjang 99,35 kilometer ini 789,29 ha.

Tanah yang sudah bebas tengah dikerjakan di lima seksi. Kamis (11/7/2019), di seksi I, puluhan alat berat, seperti ekskavator, truk, dan *drum roller*, dioperasikan. Jalan tol sudah bisa dilalui meski beberapa titik belum tersambung.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda Seksi V Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XII Herry Susanto mengatakan, beberapa pembebasan la-

han butuh waktu di pengadilan. Masalahnya beragam. "Tidak semua (proses) di pengadilan lama. Pembebasan lahan juga merupakan kerja lintas instansi. Prosedur itu yang perlu dilewati," kata Herry ketika dihubungi, Kamis.

Pembebasan lahan ini harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, kementerian, dan pengadilan. Herry tidak bisa menyebutkan kapan pembebasan tanah bisa selesai karena terkait banyak instansi dan sejumlah proses.

Berdasarkan data BBPJN XII hingga Juni 2019, ada tambahan tanah di seksi V. Sebanyak 37 bidang dalam tahap konsinyasi senilai Rp 15,3 miliar, 25 bidang tanah pada tahap validasi senilai Rp 12,8 miliar, dan 25 bidang tanah pada tahap pengukuran peta bidang. Selain itu, ada permin-

taan pembebasan tanah sisa 34 bidang yang masih diukur.

PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JBS) yang menangani seksi II, III, dan IV sepanjang 66 km juga masih mengebut pengerjaan. Pengerjaan ini butuh dana tambahan untuk sambungan jalan sepanjang 1,6 km. "Dana tambahan masih kami ajukan," ujar Direktur Teknik dan Operasi PT JBS Edy Nugraha.

Selain pembebasan lahan, keadaan tak terduga di lokasi pembangunan juga jadi kendala. PPK Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi V BBPJN XII Dodi Tanjung mengatakan, tiga pipa diameter 60-70 cm milik PDAM melintang di seksi V.

Total investasi proyek Rp 9,97 triliun dari APBN, APBD, dan pinjaman asing. Mayoritas saham proyek dikuasai BUMN infrastruktur. (CIP)

Judul	Wisata Sumba Masih Minim Infrastruktur	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 16)		
Resume	Wisata minat khusus di Sumba, NTT, terus bergeliat di tengah keterbatasan akomodasi dan infrastruktur pendukung.		

Wisata Sumba Masih Minim Infrastruktur

Wisata minat khusus di Sumba, Nusa Tenggara Timur, terus bergeliat di tengah keterbatasan akomodasi dan infrastruktur pendukung.

WAINGAPU, KOMPAS — Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur didesain menjadi kawasan wisata minat khusus. Namun, akses menuju ke Sumba masih terbatas, begitu pula akomodasi dan infrastruktur penghubung kawasan wisata. Butuh percepatan pembangunan dan pembukaan akses untuk menggenjot wisata di pulau tersebut.

Sumba memiliki potensi wisata alam yang ikonik, di antaranya sabana atau padang rumput serta kekayaan fauna, seperti kuda sandalwood, kakak tua jambul jingga, dan burung julang. Ada pula kekayaan budaya, seperti tenun ikat. Sayangnya, fasilitas pendukung potensi wisata itu masih minim.

Akses menuju Sumba, misalnya, masih terbatas. Penerbangan langsung dari Bali menuju Waingapu di Sumba Timur baru dilayani tiga pesawat. Selebihnya harus transit di Kupang. Saat liburan, seperti bulan Juli, tiket menuju Waingapu ataupun Waikabubak sulit didapat.

Konektivitas lewat laut lebih minim lagi. Kapal Peln yang berlabuh di Waingapu hanya melayani rute laut ke kota di NTT, seperti Kupang, Ende, dan Labuan Bajo. Tidak ada kapal wisata yang menghubungkan Waingapu dengan kota wisata lain.

Bupati Sumba Timur Gidion Mbiliwora se usai membuka Expo Tenun Ikat Sumba, di Lapangan Pahlawan Waingapu, Kamis (11/7/2019), mengatakan, akses menuju Sumba termasuk di Sumba Timur memang terbatas. Sering kali pada saat libur panjang tiket pesawat ludes. Begitu pun hotel dan tempat penginapan. Tercatat baru ada tiga hotel berbintang tiga di kabupatennya. Selebihnya *homestay* dan penginapan tingkat melati.

"Saat ada acara seperti ini,



KOMPAS/TOTOH WILAYANTO

Wisatawan menikmati keindahan pemandangan deretan perbukitan sambil menunggu matahari tenggelam di Desa Kombapari, Katala Hamu Lingu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/7/2019). Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mempromosikan tempat wisatanya mulai dari pesona alam hingga budaya, antara lain Festival Kuda Sandalwood dan Expo Tenun Ikat Sumba.

banyak yang tidak kebagian tiket pesawat. Hotel-hotel terpaksa menolak wisatawan karena penuh," katanya.

Untuk mendukung pembangunan akses ke Sumba, Pemkab Sumba Timur menyiapkan lahan untuk bandara baru seluas 50 hektar. Bandara itu didesain bisa menampung pesawat berbadan besar. Bandara yang ada saat ini hanya bisa menampung pesawat kecil.

Gidion meminta pemerintah pusat membantu menambah penerbangan dari dan ke Waingapu dan membangun infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata. "Kami tahun ini menganggarkan Rp 4,4 mi-

liar untuk pariwisata. Dana itu untuk promosi dan pembinaan. Itu pun kurang, seharusnya Rp 10 miliar," katanya.

Sementara itu, sejumlah investor mulai masuk ke Sumba Timur untuk membangun resor dan hotel. Kemungkinan beberapa tahun lagi Sumba Timur sudah memiliki jumlah kamar penginapan lebih banyak.

Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Esthy Reko Astuti mengatakan, konektivitas dan akomodasi akan dibangun seiring dengan dikembangkannya NTT sebagai kawasan wisata baru yang potensial. NTT, terutama Sumba, didesain jadi wisata minat khu-

sus karena potensi alamnya. "Wisata minat khusus ini tidak bisa didatangi secara massal karena harus memperhatikan aspek lingkungan dan manusia. Namun, sebagian tetap bisa jadi wisata umum," kata Esthy.

Untuk mendukung wisata di Sumba, Kementerian Pariwisata fokus mempromosikan Sumba dengan berbagai festival, di antaranya Expo Tenun Ikat Sumba dan Festival Kuda Sandalwood di sabana Puru Kambera. Expo Tenun Ikat Sumba dibuka kemarin di Lapangan Pahlawan Sumba Timur, diikuti 200 petenun. Festival kuda sandalwood dimulai hari ini di Puru Kambera. (NT/APO/LUK)

Judul	Pemulihan Citarum: Dana Rp 1,4 Triliun Siap Dicairkan	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 16)		
Resume	Penanganan limbah domestik dan industri di Sungai Citarum, Jawa Barat, memasuki babak baru.		

PEMULIHAN CITARUM

Dana Rp 1,4 Triliun Siap Dicairkan

KUNINGAN, KOMPAS — Penanganan limbah domestik dan industri di Sungai Citarum, Jawa Barat, memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat pinjaman Bank Dunia melalui pemerintah pusat senilai Rp 1,4 triliun, yang bisa diserap pemerintah daerah sesuai program pemulihan sungai sepanjang 297 kilometer itu.

Dana bisa cair pada semester awal 2020. "Sekarang dana ada, tinggal kita kompak bekerja untuk Citarum," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kamis (11/7/2019), di Kabupaten Kuningan. Turut hadir, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan kepala daerah dari 27 kabupaten/kota di Jabar.

Pinjaman itu difokuskan bagi delapan kabupaten/kota di daerah aliran sungai (DAS)

Citarum. Daerah itu ialah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Bekasi, Purwakarta, dan Karawang.

Pemerintah daerah diminta mengusulkan detail program pemulihan Citarum. Program bisa pembuatan bank sampah, truk sampah, dan biodigester.

Dana Rp 1,4 triliun itu diprioritaskan untuk 22 sektor di 629 desa dari 112 kecamatan di delapan kabupaten/kota. Volume sampah dari ratusan desa itu 3.444 ton per hari atau 9,68 persen dari produksi sampah Jabar yang mencapai 35.556 ton per hari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Bambang Rianto mengatakan, dana itu dapat membantu pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum tujuh tahun sejak 2018. "Dengan Rp 1,4 triliun, sampah di 629 desa

itu tertangani semuanya dalam lima tahun. Sampah akan diolah sejak rumah tangga, tingkat RT, dan RW," ujarnya.

Sebagian besar sampah Citarum dari wilayah Bandung Raya. Karena itu, kata Kamil, sekitar 70 persen dana akan diberikan ke Bandung Raya.

Menurut Bambang, pihaknya bakal membuat kawasan pengelolaan sampah khusus, seperti pusat sampah organik di sepanjang DAS Citarum. Titik-titik lokasinya masih dikaji. Pada 2021, ratusan desa itu ditargetkan bebas dari buang air besar sembarangan.

Target lain, penanganan 53.298 hektar lahan kritis di DAS Citarum hingga 2024. Lalu, 1.242 industri di Bandung Raya akan didampingi agar tidak membuang limbah ke sungai. "Limbah 13.000 ternak di sekitar Citarum juga akan dikelola jadi pupuk organik," ujar Bambang. (IKI)

Judul	Pariwisata Labuan Bajo: Desain Besar Pengembangan Disusun	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 16)		
Resume	Pemerintah menyiapkan desain besar pengembangan kawasan wisata strategis Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.		

PARIWISATA LABUAN BAJO

Desain Besar Pengembangan Disusun

LABUAN BAJO, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan desain besar pengembangan kawasan wisata strategis Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya mengintegrasikan destinasi wisata dan sarana penunjang, pelestarian lingkungan juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan wisata di Labuan Bajo.

Untuk menyusun desain besar itu, Presiden Joko Widodo meninjau Labuan Bajo, Rabu-Kamis (10-11/7/2019). Kemarin, Presiden Jokowi melihat kondisi Pulau Rinca, salah satu pulau di kawasan Taman Nasional Komodo, yang juga menjadi habitat komodo. Goa Batu Cermin, destinasi wisata lainnya, juga dikunjungi. Selain itu, terminal penumpang dan terminal kargo di Pelabuhan Philemon.

"Kami akan buat desain besar, rancangan besar pariwisata

Labuan Bajo. Rancangan besar ini yang sebentar lagi kami buat rapat terbatas sehingga *grand design*-nya betul-betul sambung semuanya," kata Jokowi, didampingi Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Desain besar itu juga dibuat agar pembenahan dan pembangunan sarana penunjang bisa dikerjakan secara menyeluruh. Pemerintah cukup mengalokasikan anggaran sekali dalam jumlah besar untuk pembangunan semua sarana penunjang.

Viktor menegaskan, komodo tetap menjadi andalan pariwisata di Labuan Bajo. "Jualan kita tetap komodo karena daya tarik itu tetap ada komodo," katanya.

Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang N

memaparkan, saat ini jumlah komodo di Taman Nasional Pulau Komodo sekitar 2.800 ekor. Sebanyak 1.040 komodo hidup di Pulau Rinca. Sebanyak 1.700 lainnya hidup di Pulau Komodo, sisanya tersebar di Pulau Padar, Nusa Kode, dan Gili Motang.

Meski kunjungan wisatawan terus digenjot, permasalahan kelestarian lingkungan tetap menjadi perhatian. Pemerintah tidak ingin lingkungan, khususnya Taman Nasional Komodo yang menjadi lokasi konservasi komodo, rusak karena pariwisata.

"Dalam desain besar itu akan ditentukan, (destinasi) mana yang untuk wisata, mana yang konservasi. Juga mana yang diberi kuota, mana yang tidak," kata Presiden.

Balai TN Komodo diminta menghitung daya dukung lingkungan agar kelestarian flora dan fauna terjaga. (NTA)

Judul	Pembangunan Infrastruktur Daerah Bergantung pada APBN	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Koran Tempo (Halaman 6)		
Resume	Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pembangunan infrastruktur di daerah saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer yang bersumber dari APBN.		

Pembangunan Infrastruktur Daerah Bergantung pada APBN

TEMPO/TONY HARTAWAN



Proyek jalan tol Kunciran-Serpong di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Juli 2018.

JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pembangunan infrastruktur di daerah saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketergantungan ini, kata dia, terlihat dari terus meningkatnya dana transfer ke daerah pada 2019 yang mencapai Rp 826,77 triliun, setara dengan 38 persen dari APBN.

Dengan ketergantungan daerah pada pendanaan infrastruktur dari pusat ini, pemerataan dan pembangunan dinilai tidak akan maksimal. Sebab, anggaran terbatas. Karena itulah, kata Mardiasmo, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), hingga swasta harus bekerja sama mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan tersebut. "Instrumen lain berupa investasi dari BUMN maupun swasta sangat diperlukan sebagai penopang untuk membiayai proyek-proyek prioritas," kata dia, kemarin.

Ke depan, Mardiasmo melanjutkan, pemerintah bakal merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Regulasi ini akan memberikan payung hukum atas inovasi dan kerja sama pusat, daerah, BUMN, dan swasta.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2019 berada di kisaran 5,07-5,1 persen. Dia mengatakan sumber pertumbuhan pada triwulan II terutama ditopang konsumsi rumah tangga yang kuat bersamaan dengan pemilu serta Ramadan dan Lebaran. Sumber pertumbuhan kedua, kata dia, adalah investasi bangunan yang berkaitan dengan berlanjutnya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

● FAJAR PEBRIANTO | CAESAR AKBAR

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Koran Tempo (Halaman 6)		
Resume	Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana saat mengunjungi Pulau Rinca, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, kemarin.		

TEMPO/SUBEKTI



Habitat Komodo. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana saat mengunjungi Pulau Rinca, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kemarin. Pulau Rinca dan Pulau Padar merupakan salah satu lokasi yang menjadi habitat komodo.

Judul	LMAN Segera Kembalikan Rp28,4 Triliun	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Akhirnya, 29 badan usaha jalan tol (BUJT) bisa bernapas lega. Dana yang telah mereka kucurkan untuk pengadaan lahan bisa segera kembali setelah ditandatangani nota kesepahaman pengembalian dana talangan tanah untuk pembangunan jalan tol dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).		

LMAN Segera Kembalikan Rp28,4 Triliun

Bisnis, JAKARTA — Akhirnya, 29 badan usaha jalan tol (BUJT) bisa bernapas lega. Dana yang telah mereka kucurkan untuk pengadaan lahan bisa segera kembali setelah ditandatangani nota kesepahaman pengembalian dana talangan tanah untuk pembangunan jalan tol dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan nota kesepahaman yang diteken menjadi dasar pengembalian dana talangan yang telah dikeluarkan BUJT untuk pengadaan lahan jalan tol. Proyek jalan tol yang digarap BUJT merupakan proyek-proyek yang masuk daftar proyek strategis nasional (PSN).

Dia menambahkan, nota kesepahaman dibagi ke dalam dua sesi. Pertama, 35 penandatanganan kesepahaman dengan 29 BUJT untuk pengadaan lahan di 36 ruas jalan tol senilai Rp13,1 triliun. Pengembalian dana talangan menggunakan tahun anggaran 2019.

"Yang kedua, MoU revisi 2018 dengan 24 BUJT di 30 ruas jalan tol. Ada 27 MoU senilai Rp15,3 triliun," ujarnya di Jakarta, Kamis (11/7).

Dari 29 BUJT yang meneken nota kesepahaman, sebanyak delapan BUJT berasal dari kelompok usaha PT Waskita Toll Road (WTR). Kedelapan BUJT itu yakni PT Pejagan Pemalang Toll Road, PT

► **Realisasi pengembalian dana talangan untuk pengadaan lahan di proyek jalan tol telah mencapai Rp34,73 triliun.**

Pemalang Batang Toll Road, PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, dan PT Trans Jabar Toll. Selanjutnya PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways, PT Waskita Bumi Wira, PT Transjawa Paspro Jalan Tol, dan PT Cimanggis Cibitung Tollways.

Sementara itu, 14 BUJT merupakan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Ke-14 BUJT itu yakni PT Jasamarga Balikpapan Samarinda, PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Cempol Pasuruan, PT Marga Trans Nusantara, dan PT Jasamarga Manado Bitung. Selanjutnya PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, PT Jasamarga Pandaan Malang, PT Trans Marga Jateng, PT Jasamarga Solo Ngawi, dan PT Jasamarga Kunciran Cengkareng.

PT Cinere Serpong Jaya, PT Marga Sarana Jabar, PT Jasamarga Probolingo Banyuwangi, dan PT Jasamarga Kualana-Tol juga jadi empat kelompok usaha Jasa Marga yang meneken nota kesepahaman serupa.

Di luar kelompok WTR dan Jasa Marga, juga hadir PT Hutama Karya (Persero) PT Wika Serang Panimbang, PT Citra Waspolutowa, PT Jakarta Tollroad Development, PT Hutama Marga Waskita, PT Translingkar Kita Jaya, dan PT Citra Karya Jabar Tol.

Secara umum, realisasi pengembalian dana talangan untuk pengadaan lahan di proyek jalan tol telah mencapai Rp34,73

triliun. Rahayu menuturkan, jumlah tersebut setara 92,2% dari jumlah tagihan yang masuk ke LMAN sebanyak Rp37,4 triliun.

REVISI ATURAN

Sementara itu, pemerintah berencana mempermudah ketentuan pengembalian dana itu dengan melakukan revisi peraturan yang sudah ada.

Dua regulasi yang digadang-gadang bakal diubah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.21/PMK.06/2017. Beleid ini mengatur tata cara pendanaan pengadaan tanah bagi PSN dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN.

Ketentuan lain yang juga akan direvisi adalah Peraturan Presiden No.102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan PSN.

Terkait dengan rencana revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/2017, Puspasari mengatakan bahwa aturan itu masih dilakukan harmonisasi.

"Revisi PMK sekarang prosesnya masih di Kementerian Hukum dan HAM, kapan selesainya, saya tidak tahu karena masih belum terlalu lama diujicobanya."

Revisi tersebut, katanya, akan memberikan fleksibilitas kepada LMAN, sehingga tidak terkunci pada satu tahun berjalan saja.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

Danang Parikesit mengatakan bahwa revisi PMK seharusnya diprioritaskan mengingat sangat penting, karena mengatur tata cara LMAN. "Nantinya LMAN bisa menggunakan dana talangan yang tidak habis pada tahun sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, Danang mengatakan bahwa pihaknya juga menginginkan adanya fleksibilitas didalam percepatan dokumentasinya. Pihak yang termasuk ke dalam proses pendokumentasian meliputi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan LMAN.

Direktur Utama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, Iwan Moedyarno mengatakan ketentuan yang berlaku saat ini terbilang kaku, karena pembayaran pengembalian dana talangan hanya bisa dilakukan pada tahun anggaran yang sama.

"Padahal di dalam prosesnya bisa lumpat

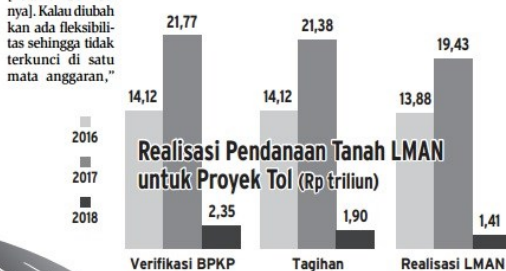
[ke tahun berikutnya]. Kalau diubah kan ada fleksibilitas sehingga tidak terkunci di satu mata anggaran,"

jelasanya kepada *Bisnis*.

Saat ini, JNK masih memiliki piutang dana talangan tanah yang belum dibayar oleh LMAN sebesar Rp110 miliar. Jumlah tersebut, menurut Iwan, berasal dari pembayaran untuk tanah kas desa. Proses dokumentasi dan administrasi pada tanah kas desa diakui memakan waktu, karena perlu persetujuan berjenjang dari bupati hingga gubernur.

Sementara itu, berdasar surat yang dikirimkan Kementerian Keuangan, alokasi pendanaan pengadaan tanah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp18 triliun, kemudian alokasi pendanaan pengadaan tanah tahun Anggaran 2019 juga sebesar Rp18 triliun.

Namun, pada saat penandatanganan nota kesepahaman untuk pengadaan lahan di 36 ruas jalan tol senilai Rp13,1 triliun untuk TA 2019 dan revisi 2018 dengan 24 BUJT di 30 ruas jalan tol senilai Rp15,3 triliun. (Ketika Putri KJ) ■



Sebanyak 29 badan usaha jalan tol (BUJT) menandatangani nota kesepahaman pengembalian dana talangan tanah untuk pembangunan jalan tol dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Secara umum, realisasi pengembalian dana talangan untuk pengadaan lahan di proyek jalan tol telah mencapai Rp34,73 triliun atau setara 92,2% dari jumlah tagihan yang masuk ke LMAN sebanyak Rp37,4 triliun.

PENGEMBALIAN DANA TALANGAN

Sumber: LMAN per 11 Juli 2019
BISNIS/TRI UTOMO

Judul	PROYEK BENDUNGAN: Raknamo Baru Berfungsi Tahun Depan	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kendati sudah diresmikan pada awal Januari 2018, Bendungan Raknamo di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, NTT hingga kini belum bisa dimanfaatkan.		

Raknamo Baru Berfungsi Tahun Depan

Bisnis, JAKARTA — Kendati sudah diresmikan pada awal Januari 2018, Bendungan Raknamo di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kini belum bisa dimanfaatkan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui bahwa saat ini di bendungan tersebut masih dilakukan pembangunan jaringan air baku, sehingga masih belum dapat dioptimalkan.

"Lagi dibikin jaringan air bakunya dan kini sedang konstruksi. Paling 1 tahun hingga 2 tahun ini selesai," katanya menjawab pertanyaan *Bisnis*, Selasa (9/7/2019).

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR, Ni Made Sumiarsih mengatakan saat ini Bendungan Raknamo memang belum diberikan izin untuk beroperasi secara penuh untuk pemanfaatan sumber air, baik untuk persawahan maupun air baku.

"Iya izin operasi dengan proses, karena ada beberapa persyaratan administrasi yang belum selesai," ujarnya.

Meski begitu, Made enggan men-

jabarkan persyaratan administrasi apa saja yang masih menghambat proses penerbitan izin pengoperasian bendungan ini.

Adapun, sebelumnya Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWSNT II), Agus Sosiawan mengatakan, selain pertimbangan teknis, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum digunakan untuk pengairan maupun air baku.

"Tahapan yang harus dilalui antara lain, bendungan harus sudah penuh terisi air, setelah itu dilakukan audit oleh Komisi Keamanan Bendungan. Kalau proses itu sudah selesai, baru akan diberikan rekomendasi untuk izin pengelolaan bendungan," ujarnya.

Agus menambahkan bahwa setelah menerima rekomendasi izin pengoperasian, maka bendungan tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan.

"Ada pertimbangan teknis karena belum diberikan izin operasi kepada kami. Salah satu syarat adalah air harus melimpah melalui *spillway* dan selanjutnya bisa diatur pola tanam dari daerah irigasi tersebut," jelasnya. *(Krizia Putri K.)*

Judul	Investor Hong Kong Incar 2 Ruas Tol WTR	Tanggal	Jum'at, 12 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	PT Waskita Toll Road (WTR) menyatakan tengah dalam tahap uji tuntas atau <i>due diligence</i> divestasi saham di dua ruas tol dengan salah satu investor asal Hong Kong. Kesepakatan jual beli saham diestimasi berlangsung pada Agustus 2019.		

Investor Hong Kong Incar 2 Ruas Tol WTR

Bisnis, JAKARTA — PT Waskita Toll Road (WTR) menyatakan tengah dalam tahap uji tuntas atau *due diligence* divestasi saham di dua ruas tol dengan salah satu investor asal Hong Kong. Kesepakatan jual beli saham diestimasi berlangsung pada Agustus 2019.

Direktur Utama WTR, Herwi-akto mengatakan pihaknya bakal melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) sebesar 40%. JSN dan JNK masing-masing merupakan entitas pengelola jalan tol Solo-Ngawi dan Ngawi Kertosono.

Herwiakto mengimbulkkan, rencana divestasi pada ruas Solo-Ngawi dan Ngawi Kertosono merupakan program divestasi rutin yang dimulai sejak 2018. Tahun lalu, WTR melepas 70% saham PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR) ke Rekasa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Danarekasa Infrastruktur Trans Jawa senilai Rp5 triliun. WTTR merupakan entitas induk dari BUJT yang mengusahakan ruas Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, dan Pasuruan-Probolinggo.

"Rencananya setiap tahun kita lepas dua, tapi memang belum tahu yang mana. Yang ini asalnya dari Hong Kong dan lebih serius. Yang dalam negeri bukan kurang serius, tapi harganya [tidak cocok],"

jelasnya di Jakarta, Kamis (11/7).

Secara terpisah, Direktur Utama JNK, Iwan Moedyarno mengatakan sudah mengetahui rencana kehadiran investor baru di dalam entitas JNK. Namun, dia mengaku tidak mengetahui entitas mana yang akan masuk sebagai pemegang saham baru di JNK. "Yang datang dari konsultan tapi saya tidak tahu mereka mewakili siapa. Waskita yang tahu, kami *enggak* ikutan," tuturnya kepada *Bisnis*, Kamis (11/7).

Selain WTR, saat ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan pemegang saham pengendali JNK dengan porsi saham 40%. Adapun, 20% saham JNK juga dipegang PT Lintas Marga Jawa, entitas yang dibentuk RDPT Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa.

Baik ruas Solo-Ngawi maupun Ngawi-Kertosono kini sudah beroperasi penuh sejak akhir 2018. Kedua ruas tol dengan panjang masing-masing 90,1 kilometer dan 86,7 kilometer itu menjadi bagian dari jalan tol koridor Trans-Jawa. Bila WTR dan calon investor asal Hong Kong menuntaskan perjanjian jual beli saham JSN dan JNK, aksi akuisisi ruas tol yang telah beroperasi makin panjang.

Berdasarkan data yang dihimpun *Bisnis*, dalam periode Januari 2017 sampai dengan Mei 2019, terdapat pengalihan

saham di sepuluh ruas jalan tol operasi berkisar 15%-45%. Peralihan ini melibatkan tujuh investor dengan nilai akuisisi Rp14 triliun. Selain akuisisi secara langsung, aksi jual beli juga terjadi secara tidak langsung lewat instrumen RDPT.

HARUS SERIUS

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berharap investor asing benar-benar masuk ke dalam proyek di Indonesia secara serius.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan bahwa divestasi ruas tol milik Waskita Toll Road yang dilirik Hong Kong bukan masalah bagi pemerintah.

"Ya mereka [investor asing] kan bisa ada beberapa cara. Yang jelas kalau setiap ada perubahan susunan pemegang saham itu atas persetujuan menteri PUPR. Itu pasti, sehingga apakah mereka prosesnya melalui *market* atau menjadi *strategic partner*," katanya, Kamis (11/7).

Menurut Danang, apabila melalui *market* maka tidak langsung masuk ke badan usahanya, sedangkan apabila melalui mitra strategis, maka investor asing akan melakukan jual beli saham kepemilikan, lalu mereka melaporkan dan meminta izin menteri PUPR.

BPJT juga memiliki kapasi-

tas finansial untuk menyeleksi investor asing yang tertarik berinvestasi pada proyek-proyek di Indonesia.

"Kami ada kapasitas finansial perusahaan, contohnya menggunakan indikator EBITDA [*earnings before interest, taxes, depreciation and amortization*] itu teliti jangan sampai yang masuk itu investor abal-abal. Kami inginnya mereka masuk dan serius menjadi bagian dari BUJT," katanya.

CEO PINA Ekoputro Adijayan-to sebelumnya mengungkapkan perusahaan asal China bakal segera meneken kesepakatan investasi sebesar Rp23 triliun dengan salah satu perusahaan jalan tol di Indonesia.

Menurut dia, China Communications Construction Company Ltd (CCCC) akan mengambil alih saham di badan usaha jalan tol (BUJT) sekaligus bertindak sebagai kontraktor *engineering, procurement and construction* (EPC).

CCCC, lanjutnya, berminat untuk berpartisipasi di beberapa proyek jalan tol sekaligus (*bundling*), baik yang sudah beroperasi maupun proyek dalam konstruksi. Kendati tidak menyebut proyek jalan tol secara spesifik, Eko mengungkapkan hanya PT Jasa Marga Tbk. dan PT Waskita Toll Road yang berpotensi menjalin kesepakatan dengan CCCC. (*Rivki Maulanda/Krizia Putri K.*)